



**DARI PARTAI KEADILAN KE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:
PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI PKS JEPARA
TAHUN 1999-2009**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun Oleh:
Ummi Nur Lutfiyah
NIM 13030115140031**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Ummi Nur Lutfiyah, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan skripsi ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 06 November 2020

Penulis,

Ummi Nur Lutfiyah

NIM. 13030115140031

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

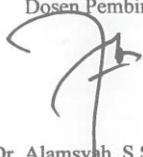
MOTTO:

“Berlelah-lelahlah manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang”

-Negeri 5 menara-

Dipersembahkan untuk:
Kedua orang tua, kakak-kakaku, serta
pembaca skripsi ini.

Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing



Dr. Alamsyah, S.S, M.Hum
NIP.197211191998021002

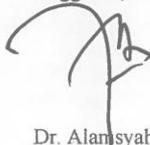
Skripsi dengan judul “Dari Partai Keadilan Ke Partai Keadilan Sejahtera: Perkembangan Dan Kontribusi PKS Jepara Tahun 1999-2009” yang disusun oleh Ummi Nur Lutfiyah (NIM 13030115140031) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Jumat, 06 November 2020

Ketua,



Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si
NIP.196106051986032001

Anggota I,



Dr. Alan Syah, S.S., M.Hum
NIP.197211191998021002

Anggota II,



Dr. Endang Susilowati, M.A
NIP. 195905161988112001

Mengesahkan,

Dekan,



Dr. Nurhayati, M.Hum.
NIP 196610041990012001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan nikmat dan hidayah-Nya skripsi yang berjudul “Dari Partai Keadilan Ke Partai Keadilan Sejahtera: Perkembangan Dan Kontribusi PKS Jepara Tahun 1999-2009” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum., selaku ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah berkenan memberikan izin serta kemudahan bagi penulis dalam usaha penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Alamsyah, S.S, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bekal ilmu dan dengan sabar memberikan arahan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Drs. Mulyono, M.Hum., selaku dosen wali, yang dengan sabar memberikan arahan dan dukungan terhadap perkembangan akademik penulis. Terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si., Dr. Alamsyah, S.S, M.Hum., dan Dr. Endang Susilowati, M.A., yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi dapat menjadi lebih baik.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan untuk segenap staf administrasi Departemen Sejarah khususnya Mbak Fatma yang telah memberikan pelayanan secara maksimal kepada

penulis. Terima kasih juga penulis haturkan kepada pihak seluruh staf-staf dinas yang terkait dengan skripsi ini, Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jepara, BPS Jepara, Dinas Komunikasi dan Informasi Jepara, Yayasan Panti Asuhan Bina Insani Jepara, SDIT Amal Insani Jepara, Dipo Asip *Suara Merdeka*, dan Kantor *Kompas*, yang telah memberikan kemudahan bagi penulisan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada: Saifuddin, Arofiq, Dirman Sudirman, Nur Alim Thamrin, Purdayanti, Bilqis, dan Haryanto atas ketersediaan waktunya untuk penulis wawancara.

Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan dorongan yang begitu besar kepada penulis. Terima kasih juga untuk mas Aziz yang selalu membimbing serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya terima kasih kepada kakak kakak ku yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada sejumlah rekan penulis di Departemen Sejarah angkatan 2015 khususnya kelas B yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada teman seperjuangan Rina, Esphy, Onoy, Bimo, Vina yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Tidak lupa, teman yang sudah menemani di perantauan ini Siti Rohmah, Eky, serta teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang terakhir, kepada penulis sendiri yang telah berjuang sampai skripsi ini selesai, walaupun sering ingin berhenti tetapi penulis selalu percaya "*badai pasti berlalu*".

Sebagai peneliti pemula, penulis menyadari bahwa pada hakikatnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna dijadikan pembelajaran di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 06 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
<i>ABSTRACT</i>	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II JEPARA DAN DINAMIKA POLITIK ISLAM TAHUN 1999-2009	24
A. Sejarah, Geografi, dan Demografi	24
1. Sejarah Singkat Jepara	24
2. Keadaan Geografis	25
3. Keadaan Demografis	28
B. Kondisi Sosial Politik, Ekonomi, dan Kultur Keagamaan	30
1. Kondisi Sosial Politik	30
2. Kondisi Sosial Ekonomi	32
3. Kondisi Kultur Keagamaan	33
C. Suara Partai Islam di Jepara Pasca Reformasi 1999-2009	38
BAB III PERKEMBANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI JEPARA TAHUN 1999-2009	
A. Dari Partai Keadilan (PK) Menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	43
B. Fase-fase Eksistensi PKS Jepara	46
1. Fase Awal Pendirian	46

2. Dinamika di Awal PKS	49
C. Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	51
1. Kepemimpinan dan Kepengurusan PKS	51
2. Sistem Kaderisasi PKS	55
a. Pengkaderan Berbasis Tarbiyah	56
b. Jenjang Pengkaderan Formal PKS	60
3. Pola Rekrutmen PKS	63
4. Pendanaan PKS	67
5. Program Kerja PKS	68
a. Program Kerja Internal	69
b. Program Kerja Eksternal	71
6. Perolehan Suara PKS Pada Pemilu Jepara	71
a. Perolehan Suara Pada Pemilu 1999	71
b. Perolehan Suara Pada Pemilu 2004	73
c. Perolehan Suara Pada Pemilu 2009	77
BAB IV	
KONTRIBUSI PKS DI JEPARA TAHUN 1999-2009	84
A. Kontribusi PKS di Legislatif	84
B. Kontribusi PKS di Eksekutif	87
1. Bidang Politik	87
2. Bidang Pendidikan	89
3. Bidang Sosial	92
C. Kontribusi PKS di Masyarakat	97
BAB V	
SIMPULAN	102
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR INFORMAN	109
LAMPIRAN	111

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	: Analisa Kapasitas dan Integritas Personal
BIJ	: Bina Insan Jepara
BPP	: Bilangan Pembagian Pemilih
BSM	: Bantuan Siswa Miskin
BTQ	: Baca Tulis Qur'an
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPRa	: Dewan Pimpinan Ranting
DPTD	: Dewan Pimpinan Tingkat Daerah
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
DSD	: Dewan Syariah Daerah
GK	: Garuda Keadilan
JSIT	: Jaringan Sekolah Islam Terpadu
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KAPMI	: Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia
KDD	: Ketua Daerah Dakwah
LCD	: <i>Liquid Crystal Display</i>
LDK	: Lembaga Dakwah Kampus
LDS	: Lembaga Dakwah Sekolah
MPD	: Majelis Pertimbangan Daerah
MABIT	: Malam Bina Islam dan Taqwa
OPT	: Orientasi Partai dan Tokoh
PPNSI	: Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia
PPNUI	: Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
PROLEGDA	: Program Legislasi Daerah
PSII	: Partai Syarikat Islam

SD IT	: Sekolah Dasar Islam Terpadu
SK	: Surat Keputusan
SMP IT	: Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
SPK	: Serikat Pekerja Keadilan
TD	: Training Dasar
TK IT	: Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
TL	: Training Lanjutan
TMKS	: Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial
TOP	: Training Orientasi Partai
TRP	: Ta'lim Rutin Partai
UPK	: Unit Pembinaan Kader

DAFTAR ISTILAH*

abangan	: golongan masyarakat yang menganut Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan.
afiliasi	: mempunyai pertalian dan berhubungan sebagai anggota atau cabang.
<i>ahlussunnah wal-jamaah</i>	: golongan yang menjalankan sunnah dengan penekanan pada peneladanan peri kehidupan Muhammad.
akhwat	: sebutan yang biasa dipakai dalam PKS untuk kader perempuan.
<i>bargaining position</i>	: posisi tawar dalam kedudukan
<i>check and balance</i>	: merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.
<i>common enemy</i>	: musuh bersama dalam politik, misalnya dalam skripsi ini yaitu; PPP, PKB, PAN, Golkar, PDIP.
<i>daurah</i>	: sarana pendidikan Islam berupa kegiatan pengumpulan sejumlah anggota yang relatif banyak di suatu tempat untuk mendengarkan ceramah.
<i>direct selling</i>	: metode memperkenalkan atau memasarkan secara langsung.
disorganisasi	: keadaan tanpa aturan karena adanya

* Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasarkan pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

	perubahan tertentu.
distingsi	: adanya perbedaan.
doktrin	: ajaran kepercayaan atau asas keagamaan ketatanegaraan atau beberapa ilmu pengetahuan yang bersifat ekstrim atau tidak bisaa dibantah.
<i>electoral treshold</i>	: ambang batas perolehan suara minimal suatu partai politik dalam pemilihan umum.
euforia	: Sebuah keadaan politik yang gegap-gempita karena adanya kebebasan setelah sebelumnya kebijakan politik yang represif.
fatsun	: adat sopan santun.
<i>flashmob</i>	: sekelompok orang yang berkumpul pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk mempromosikan/memperkenalkan partai politik.
fusi	: gabungan yang terjadi dari beberapa perkumpulan.
<i>good governance</i>	: pemerintahan yang bagus.
halaqah	: pertemuan kelompok dalam suatu pengajian.
harakah	: pergerakan kegiatan dalam lapangan sosial (politik dan sebagainya).
hegemonis	: pengaruh kepemimpinan.
ideologi	: kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup.
<i>ikhwan</i>	: sebutan yang biasa dipakai dalam PKS untuk kader laki-laki.

ilusif	: bersifat palsu dan menyesatkan.
integral	: Tidak terpisahkan satu sama lain.
<i>jasadiyah</i>	: jasmani atau fisik.
<i>juz'iyah</i>	: perbagian.
koalisi	: kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara sebanyak banyaknya dalam parlemen.
konstituen	: pemilih.
kontestan	: peserta kontes (perlombaan, pemilihan, dan sebagainya).
<i>legal drafting</i>	: perancangan hukum.
legitimasi	: pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang).
mabit	: salah satu sarana tarbiyah dengan cara bermalam.
madani	: menjunjung tinggi nilai, norma, hukum, ilmu, teknologi yang beradab.
<i>madrasah diniyyah</i>	: lembaga pendidikan yang mengkaji agama.
majelis syuro	: lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai lembaga <i>Ahlul Halli wa-Aqdi</i> .
manifestasi	: perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan.
mukhayyam	: sarana tarbiyah jasadiyah melalui latihan fisik dan simulasi ketaatan. Kemah dalam rangka kaderisasi dan doktrinasi terhadap kader.
<i>murabbi</i>	: guru.
nahdliyin	: Sebutan bagi warga masyarakat yang berafiliasi atau sebagai anggota ormas NU (nahdlatul ulama).

pendidikan takmiliyah	: pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum.
polarisasi	: pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan.
radikal	: amat keras menuntut perubahan.
<i>rahmatan lil alamin</i>	: agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta.
redefinisi	: kemampuan merumuskan batasan dengan melihatnya dari sudut lain, bukan dari cara yang lazim.
reformasi	: perubahan untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara.
rekapitulasi	: ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan.
represif	: bersifat represi yaitu menekan, mengekang, menahan atau menindas.
reses	: masa perhentian atau masa istirahat.
rezim	: pemerintahan yang berkuasa.
rihlah	: program perjalanan kolektif kader PKS untuk membuktikan loyalitas PKS.
<i>rule of game</i>	: aturan main
skeptis	: bersifat kurang percaya/ragu-ragu.
<i>soft skill</i>	: kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan.
stigma	: ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya.
<i>sundukuna juyubuna</i>	: prinsip yang ada dalam PKS bahwa dana

	partai berasal dari para kadernya.
supervisi	: pengawasan tingkat tinggi.
syiah	: salah satu sekte pecahan dari Islam.
<i>syumuliah</i>	: seseluruhan.
tarbiyah	: pendidikan.
tipologi	: golongan menurut corak watak masing-masing.
<i>tsaqafah</i>	: pengetahuan yang aqidah Islamiyah menjadi sebab pembahasan, pengajaran dan penyebarannya.
<i>underbow</i>	: organisasi sayap
usroh	: Salah satu kegiatan tarbiyah berbentuk perkumpulan pembinaan dalam kelompok kecil sesama kader PKS.
wahabi	: aliran dalam Islam yang ditunjukkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab.

DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta Kabupaten Jepara	27
2.2	Peta Kepadatan Penduduk Jepara Tahun 2009	29
3.1	Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jepara Periode 2006-2010.	53
3.2	Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jepara Periode 2006-2010	54
3.3	Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 Dipandu Oleh Ketua Pengadilan Negeri	76
3.4	Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota DPRD Periode 2009-2014 Berlangsung Di Pendopo Kabupaten Jepara	81
4.1	Struktur Kepengurusan Yayasan Panti Asuhan Bina Insani Jepara Tahun 2006-2009	95

DAFTAR TABEL

2.1	Kondisi Demografi Kabupaten Jepara Pada Tahun 2000-2009	28
2.2	Jumlah Penduduk Jepara Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin	30
2.3	Banyaknya Penduduk Usia 10 Keatas Menurut Mata Pencaharian Di Jepara Tahun 2000	33
2.4	Penyebaran jumlah penduduk di Jepara Berdasarkan Agama Yang Dianut Tahun 2000	35
2.5	Jumlah ulama atau penyiar agama Islam di Jepara Tahun 2000-2009	36
2.6	Jumlah Pesantren dan Santri di Kabupaten Jepara tahun 2000	37
3.1	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Jepara Dan Prakiraan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2004 Pada Daerah Pemilihan 1 (Jepara, Tahunan, Kedung, Karimunjawa)	75
4.1	Kegiatan Sehari-hari Santri Yayasan Panti Asuhan Bina Insani Jepara Tahun 2006-2009	94

DAFTAR LAMPIRAN

A. Koran Kompas 21 April 2003 “Partai Keadilan Sejahtera Dideklarasikan Bersama PK”	111
B. Koran Kompas 20 Mei 2000 “Partai Keadilan Mungkin Ganti Lambang”	112
C. Arsip Siaran Pers No. 01/SP/DPP-PKS/V/1424 tentang Penggabungan Struktur DPP Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera: Penjaringan Calon Presiden Berbasis Kader dan Masyarakat (Jaringan Capres Emas): Dan Perkembangan Terakhir Seputar Kebohongan Publik Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Inggris atas Iraq, Jakarta, 20 Juli 2003.	113
D. Surat Keputusan Nomor. 206/D/SKEP/AK-PKS/V/1427 mengenai susunan pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jepara Periode 2006-2010	114
E. Materi Kurikulum Tarbiyah pada bidang <i>halaqah</i>	117
F. Data Perolehan Kursi Pemilu 2009	119
G. Majalah Gelora Bumi Kartini edisi Agustus 2004 “Mengemban Amanat Rakyat”	120
H. Majalah Gelora Bumi Kartini edisi April 2009 “Ganti Aturan Ganti Jumlah”	121
I. Majalah Gelora Bumi Kartini edisi Agustus 2009 “Pelantikan Anggota Dewan”	122
J. Majalah Gelora Bumi Kartini edisi April 2009 “Perbandingan Jumlah Kursi Parpol”	123

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Dari Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera: Perkembangan dan Kontribusi PKS Jepara Tahun 1999-2009”, mengkaji tentang perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jepara yang muncul pada tahun 1999 dengan nama Partai Keadilan (PK) dan kontribusinya pada level legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Ada tiga permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: pertama, bagaimana awal munculnya partai politik PKS pada masa reformasi di Jepara; kedua, bagaimana perkembangan partai politik PKS di Jepara pada tahun 1999-2009; ketiga, apa saja kontribusi yang diberikan partai politik PKS pada elemen masyarakat Jepara.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis sumber sejarah melalui tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Data primer berasal dari dokumen, koran lokal, dan informasi dari sejumlah narasumber. Adapun data sekunder bersumber dari buku dan artikel dalam jurnal yang mendukung topik ini. Skripsi ini menggunakan pendekatan politik karena mengkaji perkembangan partai politik Islam, yaitu PKS di Jepara.

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta sejarah yang dikaji, hasil penelitian ini adalah: Pertama, PKS di Jepara diinisiasi oleh intelektual muda yang memiliki semangat mengembangkan Islam Politik dengan mengusung agenda politik yang bersesuaian dengan nilai-nilai Islam di Jepara. Inisiatif ini diilhami oleh konstelasi politik nasional di mana PKS (saat itu bernama PK) lahir dari gerakan dakwah kampus yang ikut berperan aktif merespon tuntutan reformasi dan mendapatkan momentum pendirian partai. Kedua, perubahan PK menjadi PKS sebagai syarat untuk mengikuti Pemilu karena sebelumnya partai ini tidak lolos *electoral threshold*. Penyebabnya, fatusunnya sebagai partai dakwah yang menggunakan strategi tarbiyah dengan *liqa* dan *daurah* dinilai mengadopsi pola Ikhwanul Muslimin dan tidak sesuai dengan ideologi dan karakter masyarakat Jepara yang sebelumnya telah berafiliasi kepada PPP, PKB, Golkar, dan PDIP. Fakta ini mendorong PKS mengubah strateginya dengan *concern* pada sektor riil dan massif, seperti bakti sosial, Pendidikan gratis, kajian ilmiah. Hasilnya cukup signifikan. Pada Pemilu 2004 PKS meraih 1 kursi dan Pemilu 2009 meraih 2 kursi di DPRD Jepara. Ketiga, keterwakilan kader PKS di DPRD Jepara mensistematisasi kontribusi PKS kepada masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan melalui jalur legislatif dan eksekutif

ABSTRACT

This thesis entitled "From the Justice Party to the Prosperous Justice Party: The Development and Contribution of the Jepara PKS 1999-2009", examines the development of the Prosperous Justice Party (PKS) in Jepara which emerged in 1999 under the name of the Justice Party (PK) and its contribution at the legislative, executive, and society. There are three problems that are examined in this thesis, namely: first, how did the emergence of the PKS political party during the reformation era in Jepara; second, how was the development of the PKS political party in Jepara in 1999-2009; third, what contributions have PKS political parties given to elements of Jepara society.

The method used in this thesis is the historical method, namely the process of testing and analyzing historical sources through the heuristic, criticism, interpretation, and historiography stages. Primary data comes from documents, local newspapers, and information from a number of sources. The secondary data comes from books and article in journal that support this topic. This thesis uses a political approach because it examines the development of an Islamic political party, namely PKS in Jepara.

Based on an analysis of the historical facts studied, the results of this study are: First, PKS in Jepara was initiated by young intellectuals who have the spirit to develop political Islam by carrying out a political agenda that is in line with Islamic values in Jepara. This initiative was inspired by a national political constellation in which PKS (at that time PK) was born from the campus da'wah movement which played an active role in responding to demands for reform and gaining momentum for the establishment of parties. Second, the change from PK to PKS is a condition for participating in the election because previously this party did not pass the electoral threshold. The reason is that its fatsun as a da'wah party that uses the tarbiyah strategy with liqa and daurah is considered to have adopted Ikhwanul Muslimin pattern and incompatible with the ideology and character of the Jepara society who were previously affiliated with PPP, PKB, Golkar and PDIP. This fact encourages PKS to change its strategy by being concerned with the real and massive sectors, such as social service, free education, scientific studies. The results are quite significant. In the 2004 Election PKS won 1 seat and the 2009 Election won 2 seats in the Jepara DPRD. Third, the representation of PKS cadres in the Jepara DPRD systematizes PKS contributions to society in the fields of education, economy, politics and culture through the legislative and executive channels.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Ciri utama masa reformasi ditandai dengan euforia politik. Euforia ini terlihat dari banyaknya partai-partai politik baru yang bermunculan dan mengikuti kontestasi pemilu. Sejak bergulirnya era reformasi, telah berdiri 160 partai politik di Indonesia. Partai yang dinyatakan lolos seleksi untuk menjadi kontestan pemilu 1999 berjumlah 48 partai politik. Pemilu yang diikuti 48 partai politik tersebut memunculkan enam partai yang melampaui *electoral threshold* 2% perolehan suara, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Terdapat 15 partai yang berhasil mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat (DPR) tetapi tidak berhasil mencapai *electoral threshold*. Partai-partai yang tidak mampu melewati *electoral threshold* tidak dapat mengikuti pemilu selanjutnya, kecuali partai itu melakukan fusi dan membentuk partai baru.¹

Euforia politik mengakibatkan munculnya orientasi Islam melalui berdirinya partai-partai yang berasas, bersimbol, dan berbasis dukungan Islam.² Perkembangan Islam di Indonesia pada masa reformasi ditandai dengan berkiprahnya partai politik Islam dalam pemilihan umum. Ada dua kelompok partai politik Islam. Pertama, partai yang berasaskan Islam, termasuk seperti Partai Keadilan (yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Nahdatul Ummah (yang kemudian berubah menjadi (PPNU)). Kedua, partai yang tidak mencantumkan

¹Dhakidae dkk, *Peta Politik Pemilihan Umum: 1999 – 2004* (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 37.

²Munafrizal Manan, *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: IRE Press, 2005), hlm. 120.

Islam sebagai dasarnya tetapi konstituen utamanya adalah umat Islam. Termasuk dalam kelompok ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang konstituennya adalah warga NU, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang konstituen utamanya adalah warga Muhammadiyah.³

Partai Keadilan muncul dari diskusi-diskusi kecil di kalangan mahasiswa beberapa universitas yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan politik. Tujuan utama gerakan tersebut adalah masuk ke dalam pelebagaan politik formal. Keberadaan Partai Keadilan dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus sebagai reaksi terhadap tindakan represif rezim Soeharto terhadap kelompok “Islam Politik”.⁴ Akan tetapi, situasi tersebut mulai berubah saat Soeharto mulai menempatkan para aktivis Islam sebagai sekutu. Sejak saat itu, gerakan yang semula bernama *Usroh* ini berganti nama menjadi *Ikhwan* dan mereka menamai aktivitasnya dengan sebutan tarbiyah.⁵ Munculnya gerakan tarbiyah ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kaum muda intelektual yang penuh semangat dan dedikasi tinggi serta adanya tempat bagi mereka untuk mengeluarkan gagasan, yaitu kampus dan masjid.

Setelah meletusnya partai politik dalam gerakan reformasi, gerakan dakwah dan tarbiyah menemukan momentum mengisi reformasi dan ikut serta membangun negeri. Melalui gerakan tarbiyah Partai Keadilan lahir, tepatnya 20

³Ridlo Al Hamdi, *Partai Politik Islam* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), hlm. 9.

⁴Secara etimologis dakwah berarti “menyeru” kepada Islam atau seruan agama untuk membangkitkan iman atau untuk menjaga masyarakat Islam dari kebejatan. Dalam pengertian terminologis, dakwah berarti mengajak masuk agama, kerja misionaris. Para aktivis dakwah disebut *du'ah* kata ini berasal dari bahasa Arab yang menunjuk pada seorang yang melakukan seruan agama, ceramah, atau penyebaran mengenai ajaran-ajaran Islam. Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS dan Syariah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 32.

⁵Ach Basyir, “Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan *Tarbiyah* Dan Pragmatis”, *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol. 3 No. 2 (Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm243.

Juli 1998.⁶ Partai Keadilan kemudian dideklarasikan pada 9 Agustus 1998 di lapangan Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Terdapat 50 orang yang turut mendeklarasikan Partai Keadilan.⁷ Pada pemilu 1999 Partai Keadilan gagal mencapai batas minimal perolehan suara karena pada saat itu Partai Keadilan hanya mendapatkan perolehan suara 1,3%. Dalam perkembangannya, Partai Keadilan berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2002. Pembahasan ini akibat adanya UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan partai politik pada pemilu selanjutnya yaitu 2%. Pada 2 Juli 2003, PKS menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, Partai Keadilan mengubah nama menjadi PKS sehingga seluruh hak milik Partai Keadilan menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Sejak saat itu Partai Keadilan resmi berubah nama menjadi PKS.

PKS hadir sebagai respon reformasi dan menginginkan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Agenda reformasi yang dimaksud seperti, *goodgovernance*, anti korupsi, penegakan keadilan, kebebasan pers dan lain sebagainya. Lahirnya Partai Keadilan dari gerakan dakwah sebetulnya tidak dikehendaki oleh sebagian anggota jamaah tarbiyah. Mereka tetap ingin bersama dalam jamaah tetapi menolak bergabung dengan partai politik PKS. Imadadun Rahmat menyebutkan bahwa PKS juga terpengaruh dan mengadopsi ideologi Ikhwanul Muslimin di Mesir. Keterpengaruhan tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan PKS seperti *usroh*, *halaqah* dan juga filosofi partai.⁸ Partai Keadilan

⁶M. Imadadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm.34.

⁷Adi Prayitno, *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 111.

⁸Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, hlm.113.

adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia yang mengadopsi ideologi dari luar negeri.

Pada konteks Jepara, daerah ini merupakan tempat yang masih kental dengan nilai agama dan masyarakatnya yang menjunjung nilai-nilai agama baik dalam hubungan kehidupan sosial maupun politik. salah satu partai politik Islam yang ada di Jepara adalah PKS. Partai ini tampil sebagai “partai kader” yang menerapkan standar ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan anggota-anggotanya.⁹ Saifudin menuturkan bahwa PKS adalah partai dakwah. Dakwah adalah kewajiban setiap individu. PKS memberikan ruang yang memadai bagi siapa saja yang ingin berjuang melalui partai politik. Gerakan-gerakan PKS dilakukan secara masif di perguruan tinggi di Jepara dan masyarakat. PKS tampil sebagai partai yang elegan, demokratis, transparan, dan logis. Bagi kalangan cendekiawan yang rasional, hal ini direspon positif. Beberapa di antaranya bergabung sebagai kader PKS.¹⁰ Meskipun demikian dalam perkembangannya PKS mengalami kesulitan dalam menguatkan dan mempertahankan eksistensinya di tengah kehadiran partai politik yang lebih dulu ada, serta harus mampu bersaing dengan partai politik yang lain dalam kontestasi politik.

Berbeda dengan respon masyarakat umum yang notabene telah berafiliasi ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PKS merupakan partai baru yang harus mampu bersaing dengan partai-partai besar yang telah ada jauh sebelum lahirnya PKS. yang telah ada jauh sebelum lahirnya PKS. Keberadaan PKS Jepara mengalami perkembangan yang tergolong lambat dibandingkan dengan daerah Selatan Jawa seperti Solo, Sukoharjo, dan Surakarta. Suara PKS di daerah Selatan lebih besar dibandingkan dengan suara PPP dan PKB yang selalu tinggi di Jepara. Hal tersebut karena hegemoni yang

⁹Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS dan Syariah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm.5.

¹⁰Wawancara dengan Saifuddin pada 20 Januari 2020. Ia adalah mantan ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera periode 2003-2005 serta anggota legislatif periode 2004-2009.

ada di daerah Selatan cenderung lebih gampang untuk diajak karena wawasannya lebih terbuka daripada mereka yang sudah memiliki latar belakang Islam yang kuat. Munculnya stigma tentang PKS sebagai partai wahabi dengan kedekatan ideologi PKS dan Muhammadiyah yang sama-sama melakukan kritik terhadap tahayul, *bid'ah*, dan *khurafat* yang diatribusikan kepada kelompok NU. Dinamika hubungan NU dan Muhammadiyah menunjukkan bahwa kedua organisasi masyarakat tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Maka wajar ketika PKS juga diidentikkan dengan Muhammadiyah.

Uraian di atas menjelaskan bahwa bagi warga NU, PKS yang diidentikkan dengan Wahabi dan memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah, dipandang lebih berbahaya dibandingkan dengan gerakan dakwah biasa. PKS dianggap sebagai ancaman karena membahayakan tatanan masyarakat di Jepara dan berpotensi menciptakan disintegrasi dalam skala yang lebih makro.

Selanjutnya PKS pertama kali ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Jepara pada pemilihan umum 7 Juni 1999 dengan memperoleh 1.528 suara (1,36%). Pada pesta demokrasi lima tahunan itu, PKS di Jepara tidak mampu mendapatkan suara yang dapat mengantarkan kadernya duduk di kursi DPRD.¹¹ PKS di Jepara harus membenahi dirinya bahwa dalam kontestasi politik, partai politik harus cermat membuat strategi. Jika tidak, partai politik itu akan keluar dari kontestasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sejak PK berganti nama menjadi PKS, suara PKS di Jepara mulai terdengar oleh masyarakat dan mendapatkan kenaikan suara dari pemilu sebelumnya. Perubahan nama dari PK menjadi PKS menjadi bukti bahwa para elit politik berjuang keras agar PKS dapat bertahan dalam kontestasi politik nasional. Hal itu terbukti pada pemilu 2004 PKS memperoleh 20.147 suara dan

¹¹“Perolehan Suara Daerah-Daerah Tingkat II Jateng”, *Suara Merdeka*, edisi 3 Agustus 1999, hlm. 13.

mendapatkan 1 kursi di parlemen. Kemudian pada pemilu 2009 mendapatkan 2 kursi di parlemen dengan perolehan 18.970 suara.¹²

Perolehan suara PKS tidak lepas dari kebijakan politik ganda yang diperankan oleh PKS, yaitu Islamisme dan pemerintahan yang baik. Sebagai partai Islam, PKS tetap mengusung nilai-nilai Islam sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu PKS menyebut partainya sebagai “partai dakwah”, sedangkan dalam mengusung program pemerintahan yang baik, PKS mendasarkan pada partai yang bersih dan jujur. Dua faktor ini yang menjadi daya tarik bagi pemilih untuk memilih PKS. Terlepas dari naiknya perolehan suara PKS, secara keseluruhan dukungan pemilih Islam terhadap partai Islam masih relatif sedikit.¹³

Sebagaimana partai lainnya, PKS punya kepentingan yang sama, yaitu hadir di masyarakat dan berperan aktif dalam mendinamisasi masyarakat Jepara. Partai politik tidak bisa skeptis, bahwa targetnya adalah massa. Dengan pola *halaqah* dan *daurah* ini, PKS ingin menampilkan kader terbaiknya untuk bersama-sama dalam kegiatan masyarakat. PKS Jepara menginginkan tercapainya dua hal sekaligus yaitu simpati masyarakat dan memenangkan pemilu. Hal yang pertama berhubungan dengan politik psikologis, bahwa PKS menginginkan simpati masyarakat Jepara yang secara umum masyarakatnya religius. Dengan program-program tersebut, kehadiran PKS bisa diterima oleh masyarakat Jepara yang secara afiliasi kepartaian, telah didahului kehadiran PPP, Golkar, dan PDIP. PKS berkeyakinan bahwa program-program tersebut belum banyak dilakukan oleh partai-partai tersebut. Faktanya, *halaqah* dan *daurah* direspon positif oleh masyarakat.

PKS merupakan salah satu partai Islam yang baik pemimpin maupun anggotanya dari kalangan anak muda dari kampus. Berawal dari embrio-embrio di

¹²“Perolehan Suara Pemilihan Umum 2004” (<https://www.kpujepara.go.id/category/pemilu-2004/> dikunjungi pada 6 Agustus 2019).

¹³Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), hlm. 35.

kampus kemudian para kader PKS yang berada di Jepara membentuk kelompok kajian (*liqa*) yang terdiri dari 10-12 orang. *Liqa* yang diadakan berisi tentang pendalaman materi keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri para kadernya. Bermula dari satu kelompok *liqa* di Jepara, sekarang semakin berkembang dan tersebar di seluruh Jepara.

Atas dasar latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengkaji perkembangan partai politik PKS di Jepara tahun 1999 sampai dengan 2009. Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana awal munculnya partai politik PKS pada masa reformasi di Jepara. Kedua, bagaimana perkembangan partai politik PKS di Jepara pada tahun 1999-2009. Ketiga, apa saja kontribusi yang diberikan partai politik PKS kepada elemen masyarakat Jepara, khususnya di bidang legislatif, eksekutif, dan kemasyarakatan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam sejarah diperlukan agar penelitian dapat fokus pada suatu peristiwa dan dianalisis secara mendalam. Ruang lingkup memberi batasan-batasan agar peristiwa sejarah yang diteliti menjadi objek penelitian yang jelas. Penelitian sejarah menggunakan tiga lingkup yang terdiri dari lingkup temporal, lingkup spasial, dan lingkup keilmuan.¹⁴

Lingkup temporal yang dipilih dalam penelitian ini adalah tahun 1999-2009. Tahun 1999 ditetapkan sebagai batas awal penelitian karena pada tahun tersebut merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh Partai Keadilan sejak berakhirnya rezim Orde Baru, serta ditetapkannya Undang-Undang nomer 2 tahun 1999 tentang partai politik. Pemilu ini digelar sebagai salah satu syarat tegaknya reformasi dan runtuhnya orde baru. Batas akhir penulisan skripsi ini adalah tahun 2009 karena suara PKS mengalami penurunan dari pemilu 2004 yang memperoleh

¹⁴Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia 1992), hlm.54-55.

20.147 suara dan pemilu 2009 memperoleh 18.970 suara. meskipun PKS mengalami penurunan jumlah suara, tetapi PKS merupakan salah satu partai politik Islam yang mendapat suara banyak dari masyarakat Jepara selain PPP. PKS dalam pemilu 2009 juga berhasil memperoleh 2 kursi di DPRD setelah pemilu 1999 tidak mendapat kursi. Hal ini memperlihatkan bagaimana strategi yang dipakai PKS sebagai partai baru yang ideologi secara kultural berbeda dengan masyarakat Jepara khususnya NU ditengah partai besar yang sudah ada untuk bisa bersaing dengan partai politik Islam di Jepara.

Ruang lingkup spasial adalah tempat penelitian ini dilaksanakan. Lingkup spasial pada penelitian ini Kabupaten Jepara yang terletak di Jawa Tengah. Alasan penulis mengambil lingkup spasial Kabupaten Jepara karena selama ini penelitian mengenai PKS lebih banyak pada level nasional dibandingkan di tingkat lokal. Alasan penulis mengambil lingkup spasial Kabupaten Jepara yaitu karena Jepara merupakan kota dengan mayoritas berpenduduk Islam. Akan tetapi, partai politik yang berbasas Islam di Jepara tidak banyak mendapatkan suara dari masyarakat Jepara. Oleh karena itu masyarakat Jepara banyak yang berlatar belakang NU dan Muhammadiyah, namun mayoritas masyarakat Jepara berafiliasi ke PPP, PKB dan PAN yang kehadirannya memang dibidangi oleh masing-masing organisasi massa tersebut. Meskipun kurang mendapat banyak pendukung seperti partai politik yang lain, namun PKS mampu menunjukkan eksistensinya dalam konstestasi politik di Jepara.

Lingkup keilmuan yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah sejarah sosial politik. Menurut Kuntowijoyo, konsep politik berhubungan dengan peristiwa sejarah yaitu gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, masa dan pemilih, budaya politik serta sosial politik.¹⁵ Studi dalam skripsi ini adalah perubahan Partai Keadilan menjadi PKS di Jepara. Sejarah sosial politik dapat menganalisis aktivitas politik

¹⁵Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 173.

masyarakat, sikap-sikap politik masyarakat, eksistensi kekuatan politik dan partai-partai politik.

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang permasalahan dan ruang lingkup di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian. Adapun rinciannya adalah sebagai berikutL:

Pertama, merekonstruksi awal munculnya partai politik berasaskan Islam khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada awal reformasi tahun 1999 sampai dengan pemilu 2009 di Jepara. Kedua, menjelaskan perkembangan dari Partai Keadilan ke PKS di Jepara pada tahun 1999-2009. Ketiga, mengungkap kontribusi PKS dalam bidang legislatif, eksekutif, dan kemasyarakatan Jepara.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya untuk menghindari kerancuan objek studi dan memperkaya materi penulisan, maka dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa buku, jurnal serta hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

Pustaka *pertama*, karya Burhanuddin Muhtadi berjudul “Dilema PKS: Suara dan Syariah”.¹⁶ Pustaka ini mendefinisikan tentang sejarah Partai Keadilan menjadi PKS dan tantangan PKS masa depan. Karya ini memotret fenomena PKS dari sudut pandang keilmuan, mulai dari asal usulnya sebagai Jamaah tarbiyah pada masa Orde Baru, pengaruh ideologi dari Ikhwanul Muslimin Mesir, pendirian Partai Keadilan pada awal reformasi, sampai dinamika internal antara berbagai aspirasi dalam PKS. Buku ini juga menjelaskan bagaimana strategi PKS memperjuangkan agenda politik Islamisnya di panggung politik Indonesia. Secara luas buku ini memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai latar belakang terbentuknya PKS. Hal ini diperlukan untuk memahami perkembangan Partai Keadilan menjadi PKS dalam penulisan skripsi ini. Perbedaan buku karangan Burhanuddin dengan isi skripsi ini terletak pada lingkup spasial. Pustaka Burhanuddin menjelaskan mengenai PKS di kancah nasional, sedangkan skripsi

¹⁶Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).

ini membahas mengenai tokoh, dinamika dan partisipasi PKS pada Pemilu di Jepara.

Pustaka *kedua* adalah karya M.Imadadun Rahmat yang berjudul “Ideologi Politik Partai Keadilan Sejahtera: Dari Masjid ke Gedung Parlemen”.¹⁷ Buku ini menjelaskan substansi ideologi PKS yang disemai oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan kemudian disempurnakan oleh pemikiran dari mesir Ikhwanul Muslimin (IM). Buku ini juga membahas satu persatu dimulai dari sejarah mengenai PKS, ideologi PKS yang terpengaruhi oleh Masyumi dan IM, ideologi IM dalam PKS, paham keagamaan PKS, pandangan PKS terhadap konsep nationstate, dan sistem kaderisasi PKS. Dalam karya Imadadun Rahmat, PKS merupakan partai yang diprakarsai oleh para aktivis dakwah kampus. Di kampus, mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Buku ini juga menjelaskan bagaimana PKS menjalankan dakwah di dalam perpolitikan di Indonesia. Ideologi-ideologi perpolitikan politik di PKS juga banyak muncul ada dalam buku ini.

Relevansi buku ini dengan penelitian penulis, yaitu membantu penulis mengetahui pemikiran Gerakan *Tarbiyah* yang menjadikan PKS sebagai sayap politik Gerakan *Tarbiyah*. Buku ini juga menjelaskan sejarah dari awal pembentukan Partai Keadilan bagaimana proses perjalanan, siapa saja tokoh-tokoh politik dari Partai Keadilan, bagaimana proses perubahan dari Partai Keadilan menjadi PKS, dan siapa saja yang berpengaruh didalam PKS.

Pustaka *ketiga* adalah karya Lili Romli yang berjudul “Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia.”¹⁸ Buku ini mencoba mencatat hal-hal penting yang terjadi dalam setiap kurun waktu dalam sejarah politik Indonesia modern. Dimulai dari 1945 sampai 2005, fokus perhatian yang diberikan adalah pada pertumbuhan partai-partai Islam pada masa reformasi dan hubungannya dengan negara. Perhatian ditujukan pada perkembangan partai-

¹⁷M. Imadadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKIS, 2008).

¹⁸Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

partai Islam pada masa pasca Orde Baru. Buku ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman terhadap hubungan Islam dan Politik, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan adanya penjelasan mengenai perkembangan partai-partai Islam di Indonesia maka buku ini relevan dengan penelitian skripsi. Buku ini relevan untuk memberikan gambaran tentang partai Islam yang dapat penulis gunakan sebagai referensi dalam menggambarkan aspek historis dari partai politik Islam. Perbedaan karya Lili Romli dengan penelitian skripsi ini terletak pada lingkup spasial. Jika karya Lili Romli membahas di lingkup nasional, maka penelitian ini dilakukan di lingkup lokal yaitu Kabupaten Jepara. Selain itu, karya tersebut dibatasi hingga tahun 2005. Skripsi ini melakukan penelitian dari tahun 1999 hingga 2009.

Pustaka *keempat*, karya Ridho Al Hamidi berjudul “Partai Politik Islam”.¹⁹ Secara garis besar, buku ini mengkaji tentang dinamika partai politik Islam yang terjadi di panggung politik Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan yang sudah mengalami tiga kali rezim, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Tentunya, peran dan tantangan di masing-masing rezim sangat berbeda yang menjadikan partai Islam harus tetap kuat dan mampu menyusun strategi politiknya. Secara lebih terperinci, buku ini mengulas tentang teori kepartaian Islam di Indonesia serta pergulatan partai-partai Islam pada pemilu 1955 hingga pemilu 2009.

Relevansi pustaka Partai Politik Islam dengan penulisan skripsi ini terletak pada bab Hakikat Partai Politik Islam, didalam bab tersebut dijelaskan mengenai Islam dan Politik, asal-usul partai Islam, pengertian partai politik Islam, prinsip-prinsip dasar partai Islam, tujuan dan fungsi partai Islam. Selain itu, bab tentang Partai Islam dan Pemilu Era reformasi yang membahas mengenai platform partai-partai Islam, pemilu 1999: kebangkitan kembali partai Islam, pemilu 2004: munculnya fenomena PKS, pemilu 2009: partai Islam semakin turun. Dengan demikian, pembahasan yang ada didalam buku tersebut relevan dengan

¹⁹Hamdi, *Partai Politik Islam* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013).

pembahasan dalam skripsi ini untuk dapat mengetahui prinsip dasar partai Islam dalam hal ini yaitu PKS yang merupakan partai politi yang berasskan Islam, serta dapat mengetahui latar belakang perkembangan PKS dalam pemilu 2004.

Pustaka *kelima*, karya yang ditulis Munafrizal Manan berjudul “Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru”.²⁰ Karya ini memuat informasi mengenai realitas politik di Indonesia, terkait dengan peranan para aktor yang saling bersinggungan di ranah negara, seperti partai politik, birokrasi, elit, dan rakyat. Pustaka tersebut juga memuat informasi mengenai wacana tentang realitas politik di Indonesia. Pustaka tersebut tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana proses transisis di negara ini berjalan dan di mana posisi rakyat, namun juga mencoba menempatkan kembali makna demokrasi secara empirik dan teoritis. Buku tersebut tidak hanya mengulas tentang perjalanan demokrasi dari awal reformasi dan pemilu 1999, akan tetapi juga membahas tentang pertautan teori politik dengan realitas objektif proses demokratisasi di Indonesia. Apabila memang pemilu dianggap sebagai mekanisme demokrasi yang paling sah dan benar, di dalam pustaka tersebut mencoba bersama-sama menelaah kembali apakah peran aktor politik didalam pemilu tersebut telah memberikan demokrasi yang hakiki, atau justru sebaliknya.

Relevansi karya ini dengan skripsi penulis ini terletak pada bab yang membahas pemilu dan partai. Bagian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pemilu 1955 dan pemilu 1999. Persamaan, perbedaan, serta dampaknya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, seperti sistem kepartaian yang digunakan dibahas secara terperinci didalam pustaka tersebut. Selain itu, pustaka tersebut berbicara mengenai kekalahan partai politik yang berasaskan Islam dalam kontestasi pemilu 1999. Dengan demikian, pembahasan yang ada didalam buku tersebut relevan dengan penulisan dalam skripsi ini. Sementara itu, kelebihan dari pustaka tersebut memenuhi syarat historiografi, ilmiah, dan tersusun secara rapi.

²⁰Manan, *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: IRE Press, 2005).

Perbedaan pustaka tersebut dengan skripsi ini terletak pada pembahasannya. Secara umum, pustaka tersebut menjelaskan pemilu 1999 dalam lingkup nasional serta dampaknya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia setelahnya, sementara skripsi ini memfokuskan pada pelaksanaan pemilu 1999 di Jepara Jawa Tengah.

Pustaka *keenam* berjudul “Prahara Partai Islam: Komprasi Konflik Internal PPP dan PKS”,²¹ karya M. Amin Nurdin, Ali Tahufan Dwi Saputra, dan Adi Prayitno. Karya ini membahas mengenai konflik internal yang terjadi pada PPP dan PKS. Dalam rentan waktu tersebut, kedua partai Islam ini mengalami konflik yang cukup menyita perhatian publik. Partai yang mencantumkan “Islam” sebagai asas partai tersebut mengalami berbagai konflik yang sebagian diakibatkan perbedaan dukungan dalam koalisi pencapresan, perebutan jabatan ketua umum, serta konflik yang melibatkan individu dengan elit partai. Tidak jarang konflik internal terjadi dalam durasi waktu yang cukup lama, sehingga membuat kader-kader mulai kehilangan gairah berpartai, bahkan menyebabkan mereka berpindah partai. Relevansi pustaka ini dengan penulisan skripsi peneliti terletak pada bab yang membahas mengenai profil PKS serta kiprahnya dalam politik Indonesia. Selain itu pustaka ini menguraikan tentang bagaimana konflik yang terjadi dalam tubuh PKS pada masa reformasi.

E. Kerangka Pemikiran

Langkah yang sangat penting dalam membuat suatu analisis dalam rekonstruksi sejarah adalah dapat menyajikan suatu kerangka pemikiran yang mencakup konsep dan teori yang dipakai dalam melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi sejarah adalah penyusunan peristiwa sejarah. Dalam merekonstruksi peristiwa sejarah yang analitis diperlukan kerangka pemikiran yang mencakup berbagai

²¹Prayitno, *Prahara Partai Islam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

konsep dan teori. Proses rekonstruksi suatu kejadian atau peristiwa akan bergantung pada pendekatan yang digunakan.²²

Konsep penting yang digunakan dalam skripsi ini adalah partai politik. Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1,²³ partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah.

Pembentukan partai politik didasarkan atas kesamaan ideologi, visi serta misinya untuk membangun dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan Negara. Sejumlah akademisi membuat definisi untuk menjabarkan dan memahami keberadaan partai-partai Islam. Partai Islam di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, adalah partai yang menyatakan Islam sebagai dasar organisasi. Kedua, adalah partai politik yang menggunakan simbol Islam atau simbol yang diidentikkan dengan Islam, seperti bulan sabit dan bintang serta kabah atau kata-kata dari bahasa Arab. Meskipun, asas politik ini tidak sepenuhnya didasarkan pada Islam atau memadukan antara Islam dan ideologi lainnya, seperti nasionalisme (Pancasila) atau sosialisme sebagai ideologinya. Ketiga, adalah partai politik berbasis massa Islam dengan tidak menggunakan simbol Islam, perpaduan antara Islam dan ideologi lain sebagai dasar orientasi politiknya, bertumpu dan tidak dapat dipisahkan dari komunitas Islam. Kategori kedua dan

²²Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia 1992), hlm.4.

²³Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1

ketiga partai politik Islam kadang dipersepsikan sebagai partai Islam yang mengedepankan nilai atau substansi Islam sebagai tujuannya daripada mencoba menanamkan syariah Islam secara formal ke dalam konstitusi negara. Munculnya kategori ini pada dasarnya menunjukkan adanya transformasi dalam kehidupan partai Islam di Indonesia.²⁴

Pada kesimpulannya partai politik Islam merupakan sebuah partai yang menonjolkan asas Islam dalam basis ideologi dan sosialnya, yakni menggunakan simbol dan idiom Islam sebagai acuan utama dalam memperjuangkan tujuan politik, interest, dan termasuk dalam merebut pemilihnya. Ada lima kriteria dalam menyebut partai politik Islam yaitu dari nama, asas, tanda gambar, tujuan dan program, serta konstituennya.²⁵ Dalam penelitian ini PKS merupakan partai yang sejak awal menegaskan dirinya sebagai partai politik berasaskan Islam.

Secara historis, PKS merupakan rangkaian panjang perjalanan sejarah Gerakan Dakwah Kampus di Universitas Indonesia (UI). Pada tahun 1985, rezim Orde Baru membuat aturan bahwa organisasi masyarakat, apapun bentuknya, harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Aturan ini ditentang para tokoh Islam, termasuk tokoh-tokoh Lembaga Mujahid Dakwah yang mulai eksis di kampus, utamanya kampus UI. Hal itu terbukti dari terpilihnya Mustafa Kamal sebagai ketua senat di Fakultas Ilmu Budaya UI dan Zulkieflimansyah sebagai Ketua Senat Mahasiswa UI. Keduanya adalah kader Jamaah tarbiyah.

Posisi strategis ini dimanfaatkan untuk semakin menguatkan eksistensinya dengan mendirikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan menjadi unit kegiatan mahasiswa. Pada perkembangannya, sering muncul terma-terma yang ditujukan kepada kelompok ini, misalnya sebutan *usroh*. Untuk soliditas anggota dan manuvernya, para aktifis LDK membuat sistem sel kaderisasi yang mirip dengan

²⁴Firman Noor, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi* (Jakarta: LIPI Press, 2015) hlm. 14.

²⁵Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara* (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999) hlm.8.

Ikhwanul Muslimin. Gerakannya masif dan sistematis. Melalui jaring sel tersebut, mereka menjadikan masjid-masjid kampus sebagai epicentrum kegiatan.

Partai politik Islam dalam studi PKS di Jepara merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

Negara dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari unsur kekuasaan. Hal ini selaras dengan hakikat politik yang berkaitan atau menyangkut dengan kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi hal-hal pokok yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan termasuk cara-cara memperoleh kekuasaan, keabsahan kekuasaan, cara-cara penyelenggaraan kekuasaan, batasan-batasan terhadap kekuasaan, dan hubungan-hubungan kekuasaan.²⁶ Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan seseorang sesuai dengan perintah. Menurut Robert M. Maciver kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jalan memberi perintah dengan menggunakan alat dan cara yang tersedia.²⁷ Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah.

Penjelasan konsep kekuasaan akan berhubungan dengan adanya parlemen. Parlemen adalah suatu lembaga tinggi negara yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih serta bertanggung-jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara.²⁸ Dalam hal ini penjelasan lebih dikerucutkan untuk dewan perwakilan rakyat (DPR). Konsep parlemen yang digunakan dalam skripsi ini berhubungan dengan kontribusi PKS dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat agar mendapatkan kekuasaan di pemerintahan.

²⁶May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung; PT Refika Aditama, 2007), hlm. 29.

²⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1977), hlm. 35.

²⁸Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

PKS merupakan partai dakwah yang memanfaatkan kekuasaan sebagai anggota legislatif untuk sarana berdakwah. Dengan demikian partai politik yang gagal dalam pemilihan umum akan terancam eksistensinya dalam persaingan mempertahankan dan merebut kekuasaan.²⁹

Pengertian perkembangan adalah suatu proses evolusi dari yang sifatnya sederhana ke arah sesuatu yang lebih kompleks melalui berbagai taraf diferensiasi yang sambung menyambung; dimulai dari perubahan-perubahan yang dapat ditelusuri sampai pada hasil akhir. Perkembangan yang terjadi di masyarakat merupakan suatu hasil proses tindakan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan. Menurut F.J. Monks, pengertian perkembangan merujuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan merujuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar.³⁰ Perkembangan yang dimaksudkan dalam skripsi ini yaitu lahirnya PKS merupakan bagian dari panjangnya rangkaian perjalanan sejarah, mulai dari lembaga non-formal di kampus hingga menginspirasi lahirnya partai politik yang akhirnya dapat diterima oleh masyarakat khususnya Jepara. PKS menjadi salah satu partai yang sangat diperhitungkan dalam kontestasi politik nasional. Meskipun terbilang baru, namun manuvernya cukup diperhitungkan. Identitasnya sebagai partai dakwah yang akrab di kalangan akademisi kampus dan cendekiawan secara umum, menjadikan partai ini identik sebagai wadah kaum cerdik cendekia. Hal ini wajar PKS yang

²⁹Samuel P Huntington (2004) dalam tulisannya tertib politik pada masyarakat yang sedang berubah (terjemahan. *Political Order in Changing Societies*, 1968), mengatakan bahwa, untuk dapat *survive* partai politik harus memiliki kelembagaan yang kuat. Pelembagaan ialah proses tata cara organisasi memperoleh nilai baku dan kestabilan. Samuelw P.Huntington, *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, (terj. *Political Order in Changing Societies*, 1968), (Jakarta: Rajawali Press, Tahun 2004) cet.2.

³⁰F.J. Monks, Knoers, dkk, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2001), hlm. 11.

sejak awal menegaskan dirinya sebagai partai politik berbasis Islam, memulai gerakan dakwahnya dari berbagai kampus. Dengan semboyan “Berkhidmat untuk Rakyat” PKS berusaha melebarkan segementasi konstituennya, dari kaum cendekiawan ke khalayak umum.

PKS Jepara yang secara struktural berstatus sebagai DPD, merespon positif strategi politik tersebut. Ini bukan tanpa alasan. Masyarakat Jepara yang mayoritas berprofesi sebagai wiraswasta dengan pendidikan menengah ke bawah, tidak mudah menerima model partai politik kaum elitis seperti PKS. Satu sisi, ini sebagai tantangan, dan pada sisi lain menjadi berkah untuk PKS. Secara kalkulasi politik, kemampuan PKS di Jepara merespon realitas sosial ini, akan membawa dampak signifikan terhadap jumlah konstituennya. Secara model, awalnya PKS lahir sebagai partai ideal. PKS memiliki organisasi yang transparan, akuntabel, rapi, dan egaliter. Secara organisatoris, PKS memiliki *blue print* kaderisasi berjenjang dengan pola tarbiyah, mulai dari halaqah/liqa, daurah, dan mukhayyam. Pola ini tepat untuk menghasilkan kader yang militan terhadap partai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),³¹ kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri ataupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi sebagai tindakan berupa perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dengan berkontribusi individu atau kelompok tersebut telah terintegrasi dengan komunitas dan lingkungannya. Dalam skripsi ini, PKS melakukan dengan cara menajamkan posisi dan perannya, yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat dan sesuai dengan kompetensi. Kontribusi yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana upaya keterlibatan yang dilakukan oleh para anggota partai politik khususnya PKS dalam keikutsertaan membangun suatu daerah melalui program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat Jepara. Kontribusi yang diberikan oleh PKS Jepara melalui bidang legislatif dengan

³¹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

adanya keterwakilan anggota PKS dalam kursi legislatif yang menjadi penghubung aspirasi rakyat, bidang eksekutif dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal berjalannya program kerja yang telah ada, serta di bidang masyarakat yaitu dengan memberikan program yang berhubungan dengan hajat orang banyak. Adanya kehadiran serta keberadaan PKS di Jepara merupakan upaya melibatkan rakyat dalam proses berpolitik sehingga partai politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam menjaga eksistensinya dalam bersaing dengan partai politik lain, PKS melakukan perekrutan dan membimbing kader-kadernya agar bisa meneruskan visi misi partai.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis sumber sejarah dan merupakan alat bantu bagi sejarawan dalam melakukan analisis penelitiannya. Metode dalam bidang ilmu sejarah menggunakan empat tahap dalam penelitian sejarah. Tahap-tahap tersebut adalah heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber-sumber yang menyimpan data dan fakta seputar peristiwa sejarah. Kritik merupakan tahap seleksi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Interpretasi adalah tahap penafsiran dan analisis dari fakta yang terdapat pada sumber-sumber sejarah. Historiografi adalah tahapan penulisan sejarah yang telah dianalisis.³²

Tahap Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber-sumber yang menyimpan data dan fakta seputar peristiwa sejarah. Pada tahap heuristik, penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Sumber primer dapat berupa arsip-arsip, surat kabar, dan laporan sezaman. Sumber-sumber yang digunakan dalam skripsi berasal dari beberapa lembaga kearsipan seperti depo arsip suara merdeka, majalah gelora bumi kartini, kantor komisi

³²Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah* (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1973), hlm.32-33.

pemilihan umum, badan pusat statistika. Sumber primer tertulis berupa data monografi dan demografi Kabupaten Jepara diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. Pencarian sumber-sumber primer di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Jepara memperoleh arsip berupa AD/ART PKS tahun 2005, perolehan suara PKS pada pemilu 2009, dan struktur kepengurusan DPD PKS Jepara. Selain sumber primer Pencarian sumber primer mengenai perolehan suara Partai Keadilan pada pemilu 1999, dan perolehan suara PKS pada pemilu 2004 dari website resmi KPU Jepara.

Selain sumber primer juga diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan orang-orang yang berkompeten dalam memberikan informasi terkait PKS di Jepara. Wawancara dilakukan dengan para informan yang dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu: orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa, orang-orang yang menyaksikan peristiwa tetapi tidak terlibat langsung didalamnya, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peristiwa tetapi mendapat keterangan dari orang yang terlibat dalam peristiwa. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan, *Pertama*, Nur Alim Thamrin, ia merupakan ketua pertama Partai Keadilan di Jepara. Ia banyak mengetahui tentang bagaimana awal mula Partai Keadilan berganti menjadi PKS di Jepara. *Kedua*, Saifuddin, ia merupakan tokoh penting dalam proses perubahan Partai Keadilan menjadi PKS di Jepara. Beliau juga merupakan ketua pertama DPD PKS Jepara. *Ketiga*, Arofiq adalah anggota legislatif terpilih pada pemilu tahun 2009 dan merupakan tokoh yang ikut serta dalam proses pembentukan PKS di Jepara. *Keempat*, Hartoyo adalah bendahara umum DPD PKS Jepara pada periode 2006-2010, ia juga menjadi tim kemenangan PKS pada pemilu 2004. Hasil wawancara ini digunakan sebagai pelengkap dan sekaligus pembanding sumber tertulis.³³ Semakin banyak informasi yang dapat dikumpulkan semakin baik pula proses penelitian dan penulisan sejarah. Hasil wawancara beberapa tokoh yang representatif diseleksi dan dibanding-bandingkan, sehingga memperoleh data yang objektif.

³³Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm.35.

Sumber sekunder yang digunakan berasal dari studi pustaka terhadap buku-buku, artikel-artikel yang dimuat dalam majalah, dan surat kabar, atau bentuk penerbitan yang lain. Sumber-sumber ini berguna untuk melengkapi sumber primer dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti. Pencarian sumber sekunder dilakukan di Perpustakaan Departmen Sejarah Universitas Diponegoro, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara, buku koleksi pribadi kader PKS di Jepara.

Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, tahap kedua dilakukan pengujian sumber melalui kritik eksteren dan interen.³⁴ Kritik sumber adalah proses seleksi keaslian dan kredibilitas terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kritik dibagi menjadi dua, yaitu kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren adalah kritik pada tampilan-tampilan luar atau fisik dari sumber untuk menguji keaslian sumber. Contohnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap tanggal pembuatan sumber. Pada penelitian ini, hal yang pertama kali dilakukan dalam kritik eksteren adalah mencocokkan tanggal pembuatan sumber dengan lingkup temporal penelitian yang telah ditentukan, yaitu tahun 1999 sampai dengan 2009. Selain itu, pemeriksaan terhadap keaslian dokumen dapat dilakukan dengan memeriksa stempel, kop, dan institusi resmi dari arsip yang digunakan. Oleh karena banyak dokumen yang dikeluarkan merupakan salinan dari aslinya, maka harus dikoroborasikan dengan sumber lainnya. Langkah itu penting dilakukan mengingat dokumen yang diragukan keasliannya akan mempengaruhi kredibilitasnya. Untuk itu, selain dilakukan kritik ekstern juga dilakukan kritik interen untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya.

Kritik interen adalah seleksi yang berfokus pada substansi informasi yang terdapat di dalam sumber untuk menguji kredibilitasnya. Data dan fakta yang terdapat di dalam sumber diperiksa dan dikonfirmasi dengan sumber lain,

³⁴Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 80-117.

sehingga dapat disesuaikan kaitannya dengan peristiwa yang dikaji. Kesesuaian dari data tersebut dibutuhkan untuk mendasari setiap analisis terhadap fakta dalam penelitian sejarah. Pemeriksaan kandungan sumber juga melibatkan logika dan nalar agar rekonstruksi sejarah yang dibangun tidak menjadi anakronik.

Tahap *ketiga*, Interpretasi adalah tahap penafsiran terhadap fakta-fakta yang didapat dari sumber sejarah. Interpretasi juga dapat diartikan sebagai proses sintesis antara satu fakta dengan fakta yang lain agar terbentuk sebuah imajinasi dari peristiwa masa lampau. Fakta-fakta yang dikumpulkan disusun secara kronologis dan kausalitas. Dengan demikian penelitian ini dapat dieksplanasikan dan selanjutnya dapat dipahami secara bulat dan utuh. Dalam tahap ini penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu politik berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antar fakta.

Tahap *keempat*, Historiografi dalam metodologi sejarah dapat diartikan sebagai penulisan peristiwa sejarah. Tahap ini merupakan tahap terakhir pada metode sejarah. Pada tahap historiografi hasil rekonstruksi peristiwa sejarah tersebut disebut sebagai sebuah karya historiografi yang kemudian disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam proses penulisan skripsi. Sistematika dalam penulisan penelitian mengenai perkembangan dan kontribusi Partai Keadilan menjadi PKS di Jepara tahun 1999-2009 terdiri atas 5 bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi, dan sistematika penulisan. Bab II Menjelaskan gambaran umum Jepara dan dinamika partai politik Islam di Jepara tahun 1999-2009. Bab dua ini terbagi menjadi tiga sub-bab pembahasan. Sub-bab pertama berisi sejarah singkat Jepara serta menjelaskan keadaan geografis dan keadaan demografis Kabupaten Jepara. Sub-bab kedua berisi penjelasan kondisi sosial politik, ekonomi, dan kultur keagamaan yang ada

di Jepara. Sub-bab ketiga berjudul Suara Partai Islam di Jepara Pasca Reformasi tahun 1999-2009.

Bab III menjabarkan pertumbuhan serta bagaimana perkembangan PKS di Jepara. Pada bab tiga terdapat 3 (tiga) sub-bab. Sub-bab pertama berisi penjelasan bagaimana Partai Keadilan (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sub-bab kedua menjelaskan fase-fase eksistensi PKS di Jepara, kemudian sub-bab ini terbagi menjadi sub-sub-bab yaitu fase awal pendirian, dinamika yang terjadi dalam PKS. Sub-bab ketiga yaitu perkembangan PKS Jepara didalamnya 6 (enam) sub-sub-bab yang menjelaskan kepemimpinan dan kepengurusan PKS, sistem kaderisasi yang dilakukan PKS (pengkaderan berbasis tarbiyah dan jenjang pengkaderan formal PKS), pola rekrutmen, pendanaan politik dan program kerja yang dilakukan PKS (program internal dan program eksternal), dan sub-sub-bab terakhir yaitu menjelaskan perolehan suara PKS pada pemilu Jepara (perolehan suara pada pemilu 1999, 2004, dan 2009)

Bab IV yaitu Kontribusi PKS di Jepara tahun 1999-2009, di dalam bab ini berisi 3 (tiga) sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai kontribusi PKS di legislatif (DPRD Jepara), sub-bab kedua menjelaskan kontribusi PKS di eksekutif (pemerintah daerah Jepara) dalam sub-bab ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub-sub-bab yaitu dalam bidang politik, bidang pendidikan, dan bidang sosial. Selanjutnya, sub-bab ketiga membahas kontribusi PKS di masyarakat Jepara.

Bab V Simpulan. Merupakan simpulan yang pada prinsipnya berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.